



economica

JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN EKONOMI ISLAM

STRATEGI MEMBANGUN KEMITRAAN
MELALUI ATRIBUT PRODUK ISLAM DAN KUALITAS PELAYANAN
DENGAN PENDEKATAN SYARI'AH MARKETING

Rahman El Junusi

PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN FILANTROPI ISLAM
(KAJIAN DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE)

Achmad Arief Budiman

LEGITIMASI AKAD JUAL BELI DAN SEWA PADA MASA RASULULLAH
DAN KOMPARASINYA DENGAN YANG DIAPLIKASIKAN
PADA SEKTOR PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARI'AH

Ali Murtadho

PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN
DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG)

Ardiani Ika S

PEMETAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003-2008

Lilis Yulianti

Fitria Ardiansyah

IMPLEMENTASI SYARIAH GOVERNANCE
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH
(STUDI PADA BANK MUAMALAT CABANG KOTA SEMARANG)

Johan Masruhan

ANALISIS PROBALITA PENDAPATAN JAMU GENDONG
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA

Heny Yuningrum

MANAJEMEN WAKAF PONDOK PESANTREN TEBUIRENG

Hasyim Syarbani

PEMETAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003-2008

Lilis Yulianti¹
Fitria Ardiansyah²

Abstarct

This research aims to analyze the size of income inequality between Jember Regency in 2003-2008, the spread map of economic growth and income between town, as well as calculate the rrelation between economic growth with income inequality.

The descriptive analyze was used, namely its research provides an overview of the topics are amined in general terms in the form of data or figures are then analyzed, classified, and has been terpreted in the form of explanation. This research using four analytical tools, among others: regional Typology; Entropy Theil Index; Gini Coefficient; Pearson Correlation.

Keyword : koefisien gini, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Istilah pembangunan bisa diartikan berbeda oleh satu orang dengan lainnya, daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan terus menerus pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (DRB) pada suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk³. Perroux mengatakan bahwa ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah adalah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang

¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Email:lilis_yulianti@yahoo.co.id

² Peneliti Sosial Ekonomi Kabupaten Jember
Email:fitria@yahoo.co.id

³ Mudrajat Kuncoro, 2003, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*.
Penerbit Erlangga hal : 7

lambat perkembangannya⁴. Hal ini, juga sesuai dengan apa yang dikemukakan Simon Kuznets bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal dengan Kurva Kuznets “U-terbalik”⁵.

Analisis mengenai ketimpangan ini relevan jika digunakan untuk menganalisis dalam lingkup yang lebih kecil, seperti ketimpangan yang terjadi antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Dengan begitu, analisis ini bisa menandakan fenomena mengenai ketimpangan yang terjadi secara lebih detail. Seperti menguraikan mengenai persebaran kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi dengan yang rendah. Dengan begitu pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita kecamatan yang rendah tersebut dengan melihat potensi yang ada di kecamatan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar kecamatan di Jember tidak sama. Pertumbuhan paling tinggi tersebar di daerah perkotaan. Sedangkan daerah pinggiran mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini dikarenakan sumber-sumber yang dimiliki berbeda; adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil⁶. Kondisi seperti ini yang menjadikan penelitian ini menarik dilakukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pola persebaran pertumbuhan dan pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Jember; (2) seberapa besar ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Jember; dan (3) bagaimana korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

TELAAH TEORITIS

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan per kapita yang merupakan pencerminan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak⁷. Pertumbuhan ekonomi memiliki tiga aspek utama yaitu proses, kenaikan output per kapita, dan berlangsung dalam jangka panjang⁸. Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah sama halnya dengan konsep pertumbuhan ekonomi secara umum. Menurut Tarigan (2004:44) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut Adam Smith (Tarigan, 2004: 45) sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi *stationer (stationary state)*. Posisi *stationary* terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan. Kalaupun

⁴ Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta hal 148

⁵ Todaro, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. hal : 240

⁶ Kuncoro, 2004, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN hal : 12

⁷ Sadono Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFEUI dan Bina Grafika hal :14

⁸ Tambunan, 1996, *Tingkat dan Pertumbuhan PDRB serta Kontribusi Sektoral Di KTI. Suatu Analisis Empiris* Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Nomor 2. Tahun IV. hal :291

da pengangguran itu sifatnya hanya sementara saja. Pemerintah tidak perlu mencampuri urusan perekonomian. Setelah terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932, pandangan Smith dikoreksi oleh John Maynard Keynes.⁹

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan TW. Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Menurut teori ini, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi.¹⁰

Perhatian terhadap usaha pembangunan industri di daerah, baru populer setelah perang dunia yang dipelopori oleh Perroux (1970), Myrdal (1957), dan Hirschman (1958). Teori Perroux (Arsyad, 1999: 147) dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan (*pole of growth*) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah.

Menurut Perroux¹¹ pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah serta perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam pula, terhadap keseluruhan perekonomian. Daerah yang menjadi pusat pengembangan akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal disegala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah yang menjadi pusat pertumbuhan atau pengembangan yaitu daerah yang pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.

2. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan antar kelompok pendapatan, termasuk antara kota dan desa bersumber pada ketertinggalannya ekonomi desa terhadap ekonomi pasar. Hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, informasi, dan penguasa yang dapat memanfaatkan kesempatan ekonomi yang terbuka, akibat terbukanya ekonomi desa maupun berbagai ragam proyek pembangunan perdesaan¹²

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang; dan distribusi "fungsional" atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.¹³ Ukuran ini dapat digunakan secara langsung menghitung penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.

Menurut Sjafrizal (1997:27), masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. *Pertama*, menyangkut masalah dibidang ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus guna mengurangi ketidakmerataan pembangunan antar daerah. *Kedua*, menyangkut masalah dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan

⁹ Menurut Keynes (Tarigan, 2004: 46), untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung.

¹⁰ Tarigan, 2004, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal: 50

¹¹ Glasson, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPFEUI. hal: 153

¹² Sondakh, 1994, *Pembangunan Daerah dan Perekonomian Rakyat: Beberapa Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat*. Majalah Prisma. Jakarta: LP3ES. hal: 3

¹³ Todaro dan Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga., hal: 221

proyek pembangunan yang juga sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pembangunan ke daerah serta beberapa ketentuan pokok dalam administrasi pembangunan. *Ketiga*, menyangkut masalah sosial budaya yang timbul dari tingkah laku dan kehidupan masyarakat setempat, yang turut mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Simon Kuznet (1955)¹⁴ membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. Ketidakmerataan pembangunan menurun seiring dengan peningkatan GNP per kapita pada tahap pembangunan selanjutnya.

Dewasa ini, terdapat banyak ulasan yang mencoba menjelaskan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun kemudian membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengaitkannya dengan kondisi-kondisi dasar pertumbuhan yang bersifat struktural. Menurut model Arthur Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern, yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi.

Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat lebih dahulu, karena sektor modern yang modern memerlukan tenaga kerja terampil, namun kemudian imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga kerja terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Sehingga walaupun Kuznets tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U terbalik secara prinsip hipotesis ini konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan ekonomi. Namun kita telah melihat bahwa, dampak pengayaan sektor tradisional dan sektor modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah, sehingga hasil nettoanya ketimpangan bersifat mendua (*ambiguous*), dan validitas empiris kurva Kuznets masih dipertanyakan.¹⁵

METODE PENELITIAN

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka akan dianalisis untuk mengetahui pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Jember. Beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat Ukur Persebaran Pertumbuhan

Menurut Kuncoro (2004: 118), tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Kategori yang digunakan untuk membagi daerah/kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (3) daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia; (4) daerah relatif tertinggal.

¹⁴Ibid. Kuncoro, 2004, hal: 126

¹⁵ Ibid, Todaro dan Smith, 2003, hal: 240-241

adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 1 Tipologi Daerah

DRB per kapita (y) laju pertumbuhan (r)	($y_i > y$)	($y_i < y$)
($r_i > r$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
($r_i < r$)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber: Kuncoro (2004: 118)

2. Alat Ukur Ketimpangan Pendapatan

(1) Indeks Entropy Theil. Dengan menggunakan Indeks Entropy Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jember. Rumus Indeks Entropy Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004: 134):

$$I(y) = \sum (y_i/Y) x \log[(y_i/Y)/(x_i/X)]$$

Keterangan:

$I(y)$ = Indeks Entropy Theil

y_j = PDRB per kapita kecamatan j

Y = rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Jember

x_j = jumlah penduduk kecamatan j

X = jumlah penduduk Kabupaten Jember

Indeks Entropy Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks Ketimpangan Entropy Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. (2) Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (panjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama) dan koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna, di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali (Hariadi, dkk. 2009 : 6). Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Dimana

- X_k = proporsi penerima pendapatan ke k
- X_{k-1} = proporsi penerima pendapatan ke k-1
- Y_k = proporsi pendapatan ke k
- Y_{k-1} = proporsi pendapatan ke k-1

Sebelum melakukan perhitungan Koefisien Gini, yang harus dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan pendapatan per kapita masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Jember menjadi sepuluh bagian yang sama (desil). Menurut Santosa dan Hamdani (2007 : 12) desil dari suatu rangkaian data adalah ukuran letak yang membagi distribusinya menjadi sepuluh bagian yang sama besarnya. Untuk itu data pendapatan per kapita masing-masing kecamatan Kabupaten Jember di urutkan dari yang terendah sampai tertinggi, setelah itu baru menghitung desil. Rumus untuk menghitung letak desil adalah sebagai berikut:

$$DP = \frac{IX}{10(N+1)}$$

Dimana,

- DP = letak desil ke i
- I = urutan desil
- N = jumlah keseluruhan atau frekuensi

Sedangkan rumus untuk menentukan nilai desil, adalah sebagai berikut:

$$D_i = LDP + \left\{ \left(\frac{DP - LDP}{UDP - LDP} \right) X(UV - LV) \right\}$$

Dimana

- D_i = nilai masing-masing desil ke i
- LDP = letak bawah pada rentang letak desil
- DP = merupakan letak desil
- UDP = letak atas pada rentang letak desil
- UV = nilai atas pada letak desil yang dihitung
- LV = nilai bawah pada letak desil yang dihitung

Teknik analisis korelasi sering dipakai, jika kita ingin melihat hubungan keeratan dua variabel. Dalam hal ini bisa digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan (Indeks Entropy Theil) antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Jember. Rumus Korelasi Pearson adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{[n \sum X^2 - (\sum X)^2]^{1/2} [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]^{1/2}}$$

¹⁶Teguh, 2005, hal: 207

Keterangan:

r = korelasi Pearson

X = rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember

Y = indeks Ketimpangan indeks Entropy theil

Bila kedua variabel yang diamati mendekati nol, berarti hubungan kedua variabel tersebut lemah. Kemudian, bila kedua variabel yang diamati mendekati satu, berarti hubungan kedua variabel tersebut kuat. Akan tetapi, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi tersebut negatif, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang terbalik.¹⁷

MBAHASAN**1. Makro Ekonomi Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember termasuk daerah agraris, karena perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 2008 sektor pertanian menyumbang sebesar 43,93% dari PDRB Kabupaten Jember. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB relatif stabil, meski nilainya relatif turun dari tahun 2003 sebanyak 44,59% menjadi 43,93% pada 2008. Sektor ekonomi tertinggi kedua disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebesar 19,41%. Sumbangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Jember memiliki trend naik tiap tahunnya, pada tahun 2003 sebesar 18,65% naik menjadi 19,41% pada 2008 atau naik sebesar 0,76%.

Sektor Jasa-jasa menempati urutan ketiga terbesar sumbangan PDRB sektoral, pada tahun 2003 sebesar 9,9% turun menjadi 9,85% pada 2008. Penurunan sektor jasa-jasa tidak terlalu signifikan besarnya, dan relatif stabil dikisaran 9% tiap tahunnya. Sedangkan sumbangan terhadap PDRB terendah adalah dari sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 0,85% pada tahun 2003 naik menjadi 0,91% pada 2008. Sektor ini bisa dikatakan bukan merupakan sektor yang menjadi basis lapangan Kabupaten Jember, sebab sumbangan sektor ini ke PDRB relatif kecil dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebesar 6,04%. Pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Jadi ada sektor-sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, begitupula sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi sektoral pada tahun 2008 terbesar berasal dari sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 7,89%. Meski pertumbuhan sektor ini besar, pertumbuhan ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebab, sektor listrik, gas, dan air bersih hanya menempati porsi terendah dalam struktur PDRB Kabupaten Jember, atau bisa dikatakan pertumbuhan ini tidak dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember terkonsentrasi di sektor pertanian.

Pertumbuhan sektoral terbesar kedua ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,16% pada tahun 2008. Sektor ini sebenarnya juga bukan merupakan sektor yang dominan dalam struktur PDRB, hanya menyumbang 4,42% dari jumlah PDRB Kabupaten Jember. Jadi bisa dikatakan bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan sektor listrik, gas, dan air bersih.

¹⁷ Teguh, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal: 208

Sektor pertanian yang merupakan basis ekonomi di Kabupaten Jember memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, yakni sebesar 5,71%. Kondisi ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan (makro). Karena basis ekonomi (sektor pertanian) memiliki pertumbuhan paling rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Jember memiliki selisih yang sangat tinggi. Kecamatan Jelbuk merupakan kecamatan dengan pendapatan per kapita terendah pada tahun 2003 sebesar Rp. 1513734. Sedangkan kecamatan Kaliwates pada tahun yang sama memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp. 7194372 (tertinggi). Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Jelbuk naik menjadi Rp. 3199122 dan Kaliwates sebesar Rp 7955158. Selisih pendapatan antar Jelbuk dengan Kaliwates tinggi dikarenakan perbedaan tipologi daerahnya. Kecamatan Kaliwates merupakan salahsatu kecamatan yang letaknya di kawasan kota. Berbeda dengan Kecamatan Jelbuk yang merupakan salahsatu kecamatan yang dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur wilayah Kabupaten Jember.

Berdasarkan data BPS Pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Jember nilainya bervariasi. Jumlah kecamatan di Kabupaten Jember sebanyak 31. Jika diklasifikasikan, pada tahun 2003 kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp. 2000000 ada sebanyak tujuh kecamatan. Kebanyakan kecamatan di Kabupaten Jember memiliki pendapatan per kapita Rp. 2000000-4000000, yakni sebanyak sembilan belas kecamatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita di atas Rp. 4000000 sebanyak lima kecamatan. Dari jumlah tersebut, tiga kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita di atas Rp. 4000000 merupakan kecamatan yang berada di kawasan kota, yakni Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Kondisi ini menandakan bahwa pendapatan yang tinggi (kesejahteraan) hanya dinikmati oleh kecamatan-kecamatan yang berada di kawasan kota. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi sektor industri, jasa, dan keuangan kebanyakan terpusat di wilayah-wilayah kota.

Perkembangan pendapatan per kapita antar kecamatan dari tahun 2003-2008 tidak terjadi secara sama, ada kecamatan yang pendapatan per kapitanya berkembang pesat, ada juga yang perkembangan pendapatan per kapita tidak begitu signifikan. Kecamatan yang pendapatan per kapitanya berkembang paling pesat adalah Kecamatan Jelbuk (111,34%), Kecamatan Mayang (106,81%), Pakusari (83,19%). Sedangkan Kecamatan Puger perkembangan pendapatan per kapita hanya 1,46% (terendah diantara kecamatan-kecamatan lainnya). Kecamatan yang berada di kawasan kota, memiliki pendapatan per kapitanya tinggi, namun perkembangan pendapatan per kapitanya rendah: Sumbersari (5,22%), Kaliwates (10,57%), Patrang (16,66%).

2. Persebaran Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita

Kabupaten Jember memiliki tipologi daerah yang khas (BPS, 2008: 45). *Pertama*, kecamatan yang merupakan dataran ngarai yang subur dan terletak pada bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Jember, terdiri dari kecamatan: Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambu Jenggawah, Ajung, Rambipuji, Balung, Umbulsari, Semboro, dan Jombang. *Kedua*, kecamatan yang dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur wilayah Kabupaten Jember, terdiri dari kecamatan: Tempurejo, Silo, Mayang, Mumbulsari, Sumberbaru, Tanggung, Bangsalsari, Panti, Sukorambi, Arjasa, Pakusari, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowati, dan Jelbuk. *Ketiga*, kecamatan kota yaitu terdiri dari kecamatan: Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang.

Perbedaan tipologi daerah ini, tentunya berpengaruh terhadap persebaran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sebab, sektor-sektor ekonomi yang berkembang di masing-masing

kecamatan otomatis dipengaruhi oleh potensi dan kondisi masing-masing kecamatan.

Menurut Kuncoro (2004: 118), tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Kriteria yang digunakan untuk membagi kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Jember; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Jember; (3) daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Jember; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kecamatan di Kabupaten Jember.

Tabel 2 Tipologi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003

pendapatan Pertumbuhan	pendapatan tinggi	pendapatan rendah
pertumbuhan tinggi	Rambipuji Patrang Sumbersari Kaliwates	Jombang Sukowono Kalisat Balung
pertumbuhan rendah	Kencong Silo Sumberbaru Bangsalsari Tanggul Wuluhan Puger Ambulu	Jelbuk Pakusari Sukorambi Mayang Mumbulsari Arjasa Sumberjambe Ajung Tempurejo Ledokombo Jenggawah Semboro Umbulsari Panti Gumukmas

Sumber : Data primer diolah 2010

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Kabupaten Jember memiliki tipologi daerah (berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita) yang berbeda. Pada tahun 2003, kecamatan yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh sebanyak empat kecamatan. Dari jumlah tersebut, tiga kecamatan termasuk kecamatan yang berada di kota. Kategori daerah maju tapi tertekan sebanyak delapan kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori sebagai kecamatan berkembang pesat sebanyak empat kecamatan. Sedangkan hampir setengah dari jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Jember (15 kecamatan), merupakan kecamatan dengan kategori kecamatan yang relatif tertinggal. Dalam artian, kecamatan yang ada di kategori ini adalah kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata kecamatan di Kabupaten Jember.

Hasil analisis tipologi daerah tahun 2003 mengindikasikan bahwa persebaran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar kecamatan di Kabupaten Jember tidak sama dan terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi hanya tersebar di kecamatan yang berada di kota. Sedangkan sebagian besar kecamatan lainnya masuk dalam kategori daerah relatif terbelakang (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah).

Pada tahun 2004 tipologi daerah antar kecamatan di Kabupaten Jember memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh jumlahnya naik menjadi tujuh kecamatan. Kecamatan Rambipuji yang pada tahun sebelumnya masuk kategori kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kondisinya bergeser menjadi kecamatan yang relatif tertinggal. Sedangkan empat kecamatan (Arjasa, Gumukmas, Sukorambi, Mumbulsari) yang sebelumnya termasuk kategori kecamatan yang relatif tertinggal, bergeser menjadi kategori kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh.

Kecamatan yang masuk sebagai kategori kecamatan pendapatan per kapita tinggi sedangkan pertumbuhan ekonominya rendah sebanyak empat kecamatan (jumlahnya tetap seperti tahun sebelumnya). Dan, kecamatan yang berkembang pesat jumlahnya sebanyak lima kecamatan. Meskipun kecamatan yang masuk kategori cepat maju dan cepat tumbuh jumlah naik, ternyata tidak mengurangi jumlah kecamatan yang masuk kategori relatif tertinggal.

Kecamatan yang masuk kategori cepat maju dan cepat tumbuh pada tahun 2005 jumlahnya naik menjadi delapan kecamatan. Dalam kategori ini, kecamatan yang konsisten dikategori ini adalah tiga kecamatan yang berada di kota (Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates). Sedangkan tiga kecamatan (Arjasa, Gumukmas, Sukorambi) yang tahun 2004 masuk kategori ini, kembali masuk ke kategori kecamatan yang relatif tertinggal, seperti kondisi semula (tahun 2003). Kecamatan yang masuk kategori maju tapi tertekan jumlahnya tiga kecamatan. Kecamatan yang merupakan kategori berkembang pesat ada sebanyak tujuh, naik dari tahun 2004 yang hanya berjumlah empat. Ternyata, naiknya jumlah kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh menjadikan jumlah kecamatan yang relatif tertinggal turun menjadi 13 kecamatan.

Pada tahun 2006 kecamatan yang masuk kategori cepat tumbuh dan cepat maju sebanyak enam kecamatan. Selain tiga kecamatan yang berada di kota, kecamatan yang konsisten berada dikategori ini adalah Semboro, Umbulsari, dan Wuluhan (sama dengan tahun 2005). Kecamatan yang masuk kategori pendapatan per kapita tinggi sedangkan pertumbuhan ekonominya rendah jumlahnya naik dari tahun 2005 sebanyak tiga menjadi empat pada 2006. Kecamatan yang termasuk kategori berkembang pesat sebanyak delapan atau naik dari jumlah tahun sebelumnya sebanyak tujuh. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah kecamatan yang masuk kategori relatif tertinggal jumlahnya turun menjadi. Ada kecenderungan jumlah kecamatan yang relatif tertinggal ini trendnya menurun tiap tahunnya.

Kecamatan yang termasuk kategori cepat tumbuh dan cepat maju pada tahun 2007 sebanyak delapan kecamatan (naik jumlahnya), ternyata Kecamatan Semboro, Umbulsari, dan Wuluhan juga termasuk kategori ini, berarti tiga kecamatan ini konsisten berada dikategori ini tiga tahun berturut-turut (2005, 2006, dan 2007). Kecamatan yang masuk kategori maju tapi tertekan sebanyak tiga kecamatan. Ada sebanyak tujuh kecamatan yang termasuk kategori berkembang pesat atau turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah delapan kecamatan. Sedangkan kecamatan yang termasuk kategori relatif tertinggal jumlahnya 12 kecamatan.



Sumber : data primer diolah 2010

Gambar 1 Tipologi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008

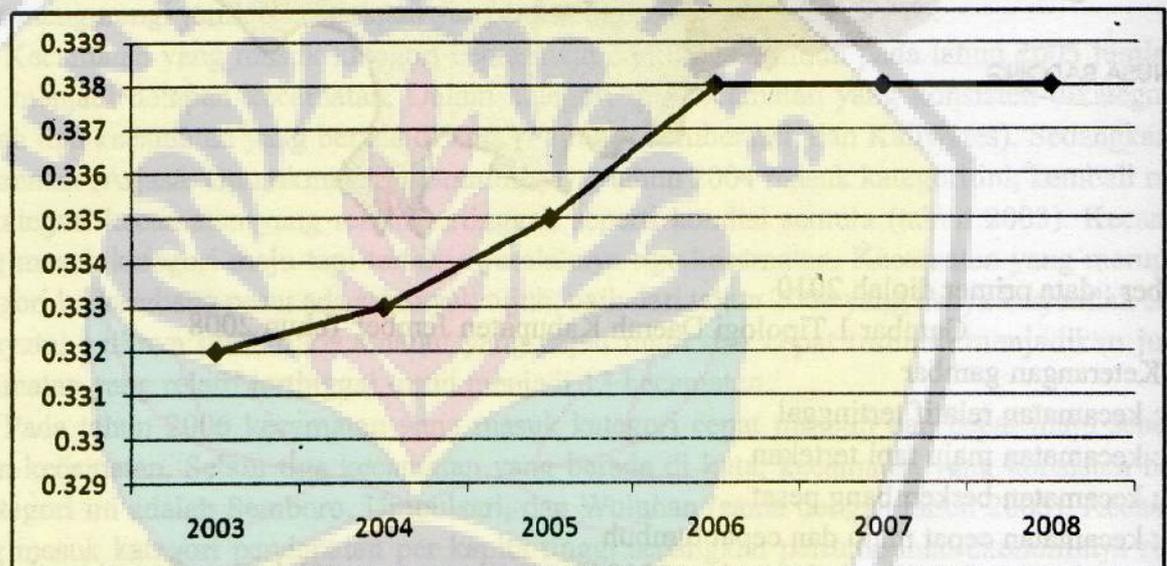
- Keterangan gambar
- : kecamatan relatif tertinggal
 - : kecamatan maju tapi tertekan
 - : kecamatan berkembang pesat
 - : kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh

Pada Gambar 1 terlihat bahwa tahun 2008 kecamatan yang masuk kategori cepat tumbuh dan cepat maju sebanyak empat kecamatan, tiga kecamatan yang masuk kategori tersebut merupakan kecamatan yang berada di kota. Kondisi ini hampir sama dengan tahun 2003. Kecamatan yang masuk kategori maju tapi tertekan jumlahnya tujuh, jika dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi penurunan. Kecamatan yang masuk kategori ini kebanyakan merupakan kecamatan yang berada di kawasan barat kabupaten. Kategori kecamatan berkembang pesat sebanyak delapan kecamatan, atau naik dari tahun 2003 jumlahnya hanya empat kecamatan. Selama rentang waktu 2003-2008 kategori kecamatan yang relatif tertinggal jumlahnya semakin menurun dari 15 kecamatan menjadi 11 kecamatan. Kondisi ini menandakan bahwa selama rentang waktu itu, jumlah kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di bawah rata-rata jumlahnya semakin berkurang setiap tahunnya. Berkurangnya jumlah kecamatan relatif tertinggal tidak bisa diartikan bahwa kondisi antar kecamatan menjadi lebih membaik. Sebab, perubahan ini mengarah menjadi kecamatan-kecamatan yang termasuk kategori berkembang pesat, dalam artian memiliki pertumbuhan di atas rata-rata, namun pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata. Berarti transformasi tipologi daerah (kecamatan) belum bisa meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan per kapita.

3. Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan

Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar kecamatan memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Jember. Semakin besar indeks ketimpangan, berarti pembangunan yang ada di Kabupaten Jember tidak memberikan dampak secara merata dirasakan oleh masyarakat. Menurut Kuncoro (2003: 100) Konsep Entropy Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan Indeks Entropy menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Indeks ini tidak memiliki batas atas dan bawah, jadi semakin besar hasil perhitungannya, berarti ketimpangan yang terjadi semakin besar.

Hasil perhitungan indeks Entropy Theil Kabupaten Jember tahun 2003 sebesar 0,332 indeks ini naik menjadi 0,338 pada 2006, hingga tahun 2008 indeks ini tetap pada angka 0,338. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jember tidak terlalu tinggi atau pendapatan distribusi pendapatan terjadi secara merata, seperti terlihat pada Gambar 2. Kenaikan indeks ketimpangan Entropy Theil nampaknya tidak terlalu signifikan dan relatif tetap nilainya.

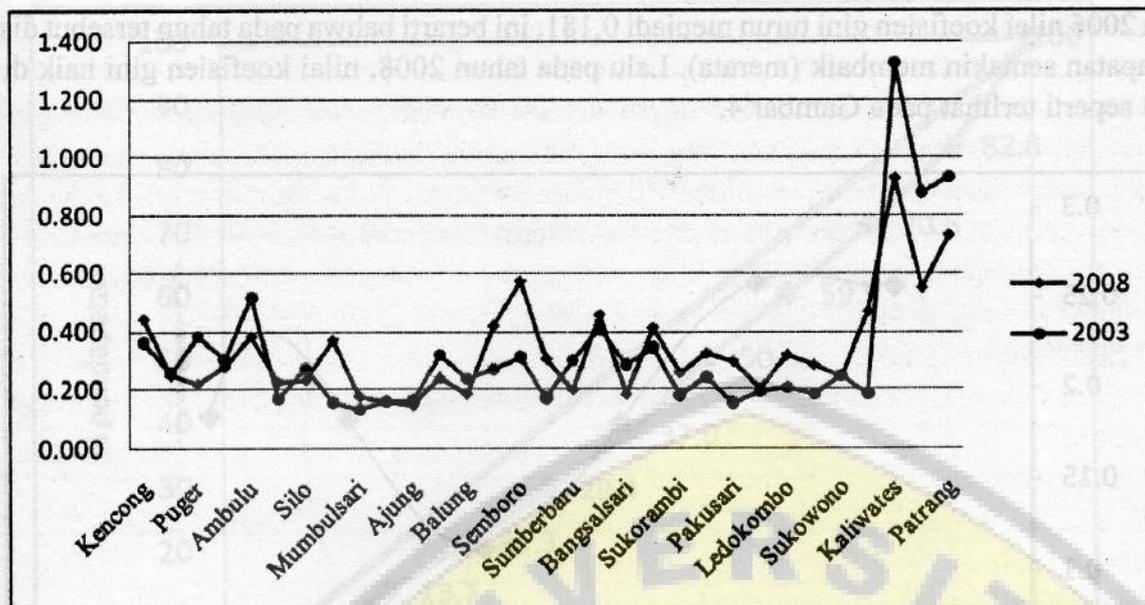


Sumber: data diolah

Gambar 3 Indeks Entropy Theil Kabupaten Jember Tahun 2003-2008

Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jember rendah, namun ketimpangan pendapatan antar kecamatan tinggi. Jika indeks ketimpangan Entropy Theil tanpa memasukkan tiga kecamatan (Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari) pada tahun 2003 indeksnya sebesar 0,25 lebih rendah daripada indeks ketimpangan di Kabupaten Jember. Sebenarnya yang menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi adalah tiga kecamatan yang berada di kawasan kota, nilai indeksnya 1,046 pada tahun yang sama.

Pada tahun 2003 indeks Entropy Theil terbesar berada di Kecamatan Kaliwates, sebesar 1,32. Tertinggi kedua Kecamatan Patrang, indeks ketimpangan Entropy Theil sebesar 0,934. Tertinggi ketiga Kecamatan Sumbersari nilai indeksnya 0,880. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan tahun 2003 antar kecamatan di Kabupaten Jember, dipicu oleh tingginya nilai indeks ketimpangan Entropy Theil dari kecamatan-kecamatan yang berada di kawasan kota. Kecuali tiga kecamatan tersebut, distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Jember relatif lebih merata.



Sumber: data diolah

Gambar 3 Perbandingan Indeks Entropy Theil Tahun 2003 dan 2008

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 mengalami trend menurun, tetapi menurunnya ketimpangan ini tidak terjadi secara linear di semua kecamatan. Trend menurun terjadi di tiga kecamatan yang berada di kota, yang pada tahun 2003 merupakan pemicu ketimpangan atau merupakan kecamatan yang ketimpangannya tinggi. Pada tahun 2003 indeks ketimpangan kecamatan yang berada di kota 1,046 angka ini pada tahun 2008 turun menjadi 0,737. Sedangkan indeks ketimpangan kecamatan-kecamatan lainnya pada tahun 2008 sebesar 0,296, angka ini naik dari tahun 2003 yang hanya sebesar 0,256.

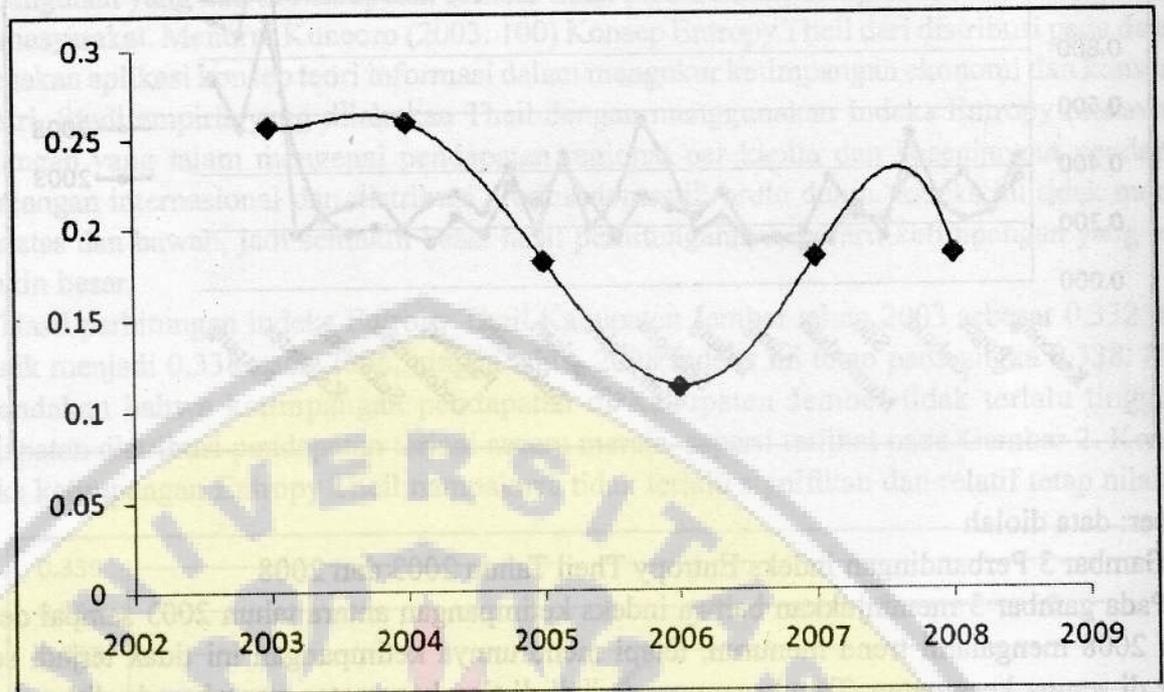
Berdasarkan perhitungan indeks Entropy Theil, bisa dikatakan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jember memiliki trend naik. Meskipun begitu, distribusi pendapatan di Kabupaten Jember relatif merata, atau indeks ketimpangannya rendah. Ketimpangan yang terjadi antar kecamatan memiliki trend yang naik pula. Namun indeks ketimpangan antar kecamatan relatif beragam, yang mencolok adalah indeks ketimpangan tiga kecamatan yang berada di kota cenderung tinggi atau bisa dikatakan jika ketimpangan pendapatan tertinggi berada di tiga kecamatan yang berada di kota. Kecamatan-kecamatan lain yang tidak berada di kota memiliki indeks ketimpangan yang relatif naik dari tahun 2003 sampai 2008, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nilai indeks ketimpangan antar kecamatan-kecamatan nonkota nilainya rendah, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan terjadi relatif lebih merata dibanding kecamatan yang berada di kota.

4. Koefisien Gini Kabupaten Jember

Menurut Todaro dan Smith (2006: 238) Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan koefisien gini kabupaten Jember memakai data pendapatan per kapita dari semua kecamatan yang ada. Kemudian data dari masing-masing kecamatan diurutkan dari pendapatan per kapita terendah sampai tertinggi, lalu dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yang sama (desil).

Hasil perhitungan Koefisien Gini Kabupaten Jember tahun 2003 sebesar 0,257. Hal ini menandakan bahwa pendapatan di Kabupaten Jember didistribusikan secara merata, sebab nilai koefisien gini di bawah 0,35. Meskipun nilai koefisien gini naik menjadi 0,259 pada tahun 2004, kenaikan ini tidak begitu mempengaruhi distribusi pendapatan di Kabupaten Jember. Justru pada

tahun 2005 nilai koefisien gini turun menjadi 0,181, ini berarti bahwa pada tahun tersebut distribusi pendapatan semakin membaik (merata). Lalu pada tahun 2008, nilai koefisien gini naik di angka 0,183 seperti terlihat pada Gambar 4.



Sumber : data penelitian, diolah

Gambar 4 Koefisien Gini Kabupaten Jember Tahun 2003-2008

Untuk memberikan gambaran secara tentang ukuran distribusi pendapatan, dipaparkan peta pendapatan jika total populasi dibagi menjadi sepuluh kelompok (desil) yang masing-masing menguasai pangsa 10%. Pada 2008 10% masyarakat miskin di Kabupaten Jember hanya menerima 6,4% dari pendapatan total. Sedangkan 10% masyarakat kaya (kelompok teratas) menguasai 18,1% dari pendapatan total. Lalu 20% penduduk miskin hanya menerima 13,5% dari total pendapatan sedangkan 20% penduduk terkaya menerima 33,1% dari total pendapatan.

Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi jika 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan, tingkat ketidakmerataan sedang jika kelompok tersebut menerima antara 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan, dan tingkat ketidakmerataan rendah jika kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan (Hariadi, dkk. 2009: 10). Dengan melihat distribusi perolehan pendapatan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Jember tahun 2008, bahwa 40% masyarakat miskin menerima pendapatan sebesar 28,8% dari total pendapatan. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, Kabupaten Jember termasuk daerah yang memiliki ketimpangan rendah. Hal ini juga didukung oleh Gambar 4 dimana kurva Lorenz cenderung mendekati garis diagonal (garis pemerataan).

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan. (1). Pola persepsi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Jember tidak se merata. Pada tahun 2003 kecamatan yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tum merata. Pada tahun 2003 kecamatan yang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tum sebanyak empat kecamatan. Dari jumlah tersebut, tiga kecamatan termasuk kecamatan yang berada di kota. Kategori daerah maju tapi tertekan sebanyak delapan kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori sebagai kecamatan berkembang pesat sebanyak empat kecamatan. Sedangkan hal senengah dari jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Jember (15 kecamatan), merupakan kecamatan dengan kategori kecamatan yang relatif tertinggal. Pada tahun 2008, tipologi da kabupaten mengalami perubahan yang berarti, kecamatan yang relatif tertinggal yang awalnya kecamatan turun menjadi 11 kecamatan. Namun sayangnya, transformasi dari kecamatan yang relatif tertinggal hanya menjadi kecamatan yang berkembang pesat, atau pertumbuhan tinggi pendapatan per kapita di bawah rata-rata, (2). Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jember relatif rendah atau bisa dikatakan distribusi pendapatan telah merata. Hal ini didukung dari perhitungan indeks ketimpangan Entropy Theil Kabupaten Jember tahun 2003 sebesar 0,332, tahun 2008 indeks ini mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan menjadi 0, Perhitungan Koefisien Gini juga menghasilkan hal yang sama, bahwa pendapatan di Kabupaten Jember telah didistribusikan secara merata. Pada tahun 2003 hasil perhitungan Koefisien sebesar 0,257 pada tahun 2008 nilainya turun menjadi 0,181. (3) Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jember telah didistribusikan secara merata. Pada tahun 2003 hasil perhitungan Koefisien ketimpangan tinggi adalah kecamatan yang berada di kota (Sumbersari, Patrang, dan Kaliwringin) ketimpangan pendapatan dalam lingkup kabupaten (secara keseluruhan). Penyebabnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jember tinggi, akan tetapi hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap indeksnya tahun 2003 secara berturut (0,880; 0,934; 1,324). Namun pada tahun 2008 indeks

PENUTUP

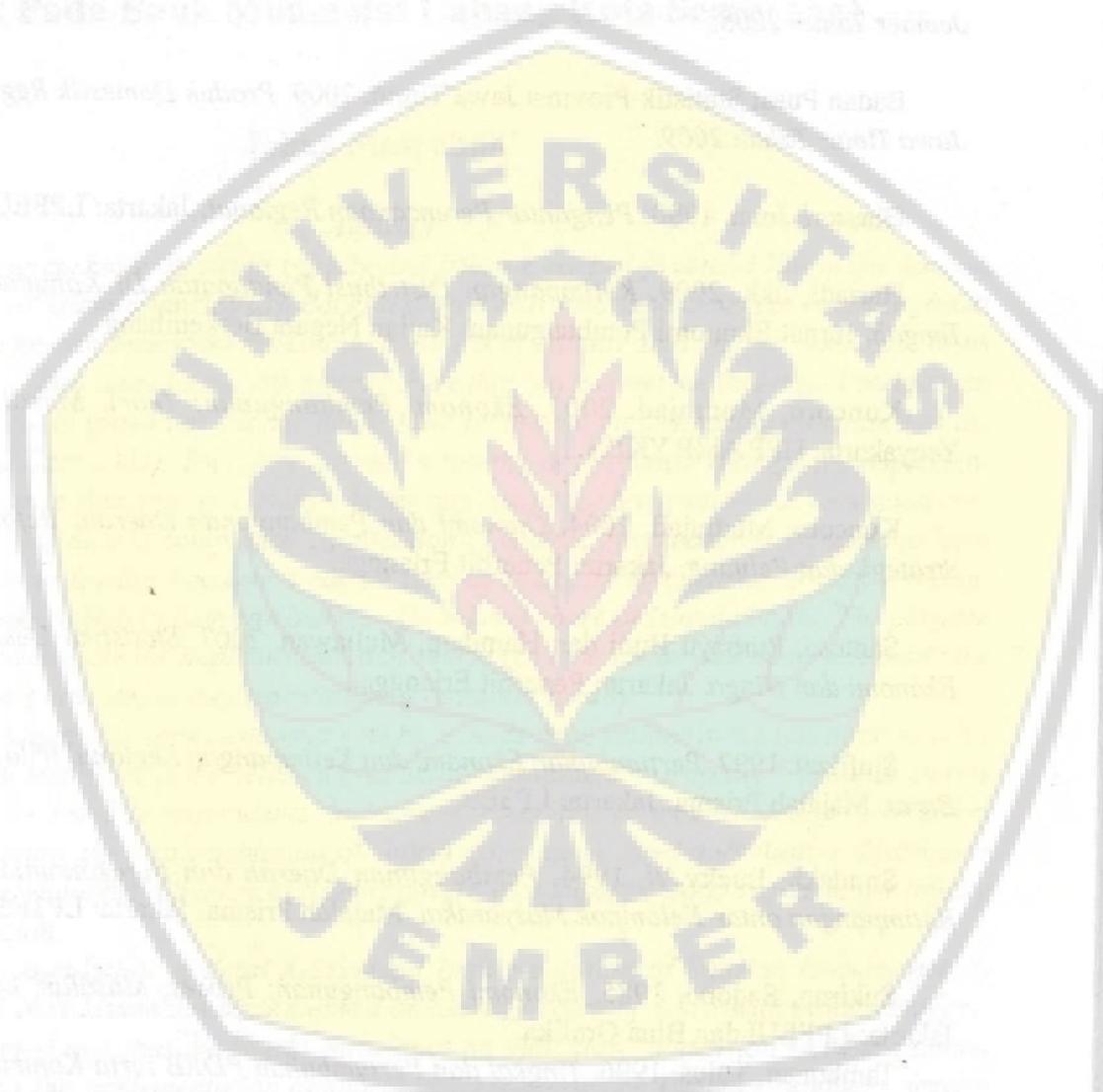
Sumber : data diolah

		* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).	
pertumbuhan	Pearson Correlation	-.763*	1
	Sig. (1-tailed)	.039	6
gini	Pearson Correlation	-.763*	1
	Sig. (1-tailed)	.039	6

Tabel 3 Korelasi Pearson

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa hubungan antara koefisien Gini dengan pertumbuhan ekonomi berbentuk non linear, pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan namun pada tahap selanjutnya ketimpangan pendapatan turun, lalu pada tahap selanjutnya ketimpangan ini berangsur-angsur naik lagi. Ternyata hipotesis Kuznets (kurva U terbalik) terjadi di Kabupaten Jember, hal ini terlihat pada Gambar 6. Hasil perhitungan korelasi Pearson seperti Tabel 3. Hasil perhitungan korelasi yang negatif ini, menandakan bahwa antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif yang kuat, dan artian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan semakin turun, dan juga sebaliknya.

mengalami penurunan menjadi (0,550; 0,733; 0,929). Jadi dapat dikatakan bahwa ketimpangan antar kecamatan pada jangka panjang memiliki trend menurun. dan (4) Berdasarkan hasil perhitungan korelasi pearson adalah negatif 0,763. Hasil perhitungan korelasi yang negatif ini, menandakan bahwa antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif yang kuat, dalam artian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan semakin turun. Selain itu, hipotesis U terbaliknya Kuznets tidak berlaku di Jember, karena pada tahap awal pembangunan ketimpangan di jember tinggi lalu berangsur-angsur turun, setelah beberapa waktu ketimpangan ini naik lagi. Namun, kenaikan ini nilainya di bawah ketimpangan pada tahap awal pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2006*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2008*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2009*.

Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPFEUI.

Hariadi, dkk. 2009. *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Negara Berkembang

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Santosa, Purbayu Budi dan Hamdani, Muliawan. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Majalah Prisma. Jakarta: LP3ES.

Sondakh, Lucky W. 1994. *Pembangunan Daerah dan Perekonomian Rakyat: Beberapa Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat*. Majalah Prisma. Jakarta: LP3ES.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFEUI dan Bina Grafika.

Tambunan, Tulus. 1996. *Tingkat dan Pertumbuhan PDRB serta Kontribusi Sektoral Di Kawasan Suatu Analisis Empiris*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Nomor 2. Tahun IV.

Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.